

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT ADIL  
BERKAH SEJAHTERA LAMPUNG TENGAH DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**ADELIA PUTRI**

NPM : 1651020488

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2020 M**

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT ADIL  
BERKAH SEJAHTERA LAMPUNG TENGAH DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**ADELIA PUTRI**

NPM : 1651020488

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Budimansyah, S. Th.I., M. Kom. I

Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Kelompok perempuan sulit mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya termasuk layanan keuangan. Sistem kredit yang mensyaratkan pembiayaan harus menyertakan agunan sulit dipenuhi perempuan, karena penguasaan atas berbagai sumber daya seperti tanah, rumah, dan aset lain secara kultural berada di bawah kontrol dan penguasaan laki-laki. Untuk itu KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera memiliki program pembiayaan tanpa jaminan untuk kaum perempuan, pembiayaan ini dikhususkan untuk kelompok usaha mikro yang dijalankan oleh perempuan. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana mekanisme dan penerapan sistem dari penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?, bagaimana manfaat dan masalah penyaluran pembiayaan KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?, serta bagaimana kesesuaian praktik penyaluran pembiayaan tanggung renteng dalam islam?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari lokasi yang berada di KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, Lampung Tengah, yang difokuskan pada Analisis Penyaluran Pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

Mekanisme pembiayaan kelompok tanggung renteng yang ada di KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : Tahap pengajuan pembiayaan, Tahap analisis dan penyeleksian, serta Tahap Pencairan. Keuntungan yang didapatkan anggota pembiayaan tanggung renteng yaitu tidak adanya jaminan kebendaan ketika mengajukan pembiayaan, Adapun masalah yang dihadapi ketika salah seorang anggota tidak disiplin atau menunggak maka anggota kelompok lain yang menanggung cicilan tersebut, maka dari itu banyak anggota kelompok yang sudah merasakan pembiayaan ini enggan untuk mengajukan pembiayaan ini kembali, sehingga terjadilah penurunan jumlah kelompok aktif pembiayaan tanggung renteng di KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera. Pembiayaan tanggung renteng yang dikelola KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera merupakan produk menggunakan akad *Murabahah Al-Wakalah*. pembiayaan kelompok tanggung renteng disini sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh DSN MUI No: 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Kafalah* atau jaminan.

## MOTTO

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

(QS. Al-Baqarah[2]:280)



## SEBUAH PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugrah cinta kasih dan sayangnya. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kukasihi yang selalu hadir menemani hari-hariku, yang mendukungku dan selalu mendoakanku. Sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, ku persembahkan skripsiku untuk :

1. Bapak dan ibu tercinta, Bpk. Hadianito dan Ibu Titik Suprihatin atas segala pengorbanan, jasa, do'a, dukungan moril maupun materil serta kasih sayangnya sepanjang masa, terimakasih sudah menghantarkanku sampai dititik ini.
2. Nenek tercinta, Mbah Pairah dan Mbah Kasmini.
3. Saudara-saudaraku, Dyah Yuliantari, Lia Kusuma Ningrum, Amilia Ningtyas, Danang Rezky Kurniawan, Hasan Basri, Arif Supriadi A. Md, Luluk Bayu Irawan, S.Kep. ,Najwa Hasna Annida serta Adam Hanan Arrasyid.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Desa Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada 26 Februari 1999, putri dari pasangan Bapak Hadiananto dan Ibu Titik Suprihatin yang merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Gaya Baru III, kegiatan yang penulis ikuti yaitu Kepramukaan, pernah mengikuti LCT kepramukaan, olimpiade matematika dan PAI tingkat kecamatan, penulis lulus pada tahun 2010.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Seputih Surabaya, kegiatan yang penulis ikuti yaitu ROHIS (Rohani Islam) dan English Club, penulis menyelesaikan pendidikan ini pada tahun 2013.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Seputih Surabaya, kegiatan yang pernah penulis ikuti yaitu Rohani Islam (ROHIS), OSIS tercatat sebagai anggota bidang InfoKum (Informasi dan Komunikasi), PMR, serta IPPNU. Penulis menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi program S1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis mengikuti kegiatan HIMA LAMTENG serta KSPMS ,penulis juga sempat juara 3 pada perlombaan Stocklab tingkat Provisi yang diadakan KSPM UNILA.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan syafaat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di hari kiamat kelak, amin.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan kepada:

1. Bpk. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S. Ag., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggeraeni, M.E.Sy, D.B.A selaku Ketua Jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bpk. Budimansyah, S. Th.I., M. Kom. I dan Bpk Ulul Azmi Mustofa, M.S.I, selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan waktu dan bimbingannya.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Seluruh Staf dan Karyawan KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera yang telah berkenan menjadi objek dalam penelitian.

6. Temen-temanku Septi serliani, Delpi Widyawati, Clara Sinta serta teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Kelas G, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis harap untuk para pembaca agar dapat memberikan sarannya guna untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi dunia perbankan dan para pembaca.

Bandar Lampung, Mei 2020

Penulis

Adelia Putri

1651020488



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	6
D. Fokus Masalah.....	11

E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Kegunaan Penelitian.....	13
H. Metodologi Penelitian.....	14

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Teori**

#### **a. KSPPS ( Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)**

1. Pengertian KSPPS.....	19
2. Dasar Hukum KSPPS.....	21
3. Tujuan dan Fungsi KSPPS.....	24
4. Produk-Produk BMT/KSPPS.....	25
5. Pengertian Pembiayaan.....	30
6. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	31
7. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	32
8. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	35

#### **b. Pembiayaan Tanggung Renteng**

1. Pengertian Pembiayaan Tanggung Renteng.....	37
2. Teori Pembiayaan Tanggung Renteng.....	38

#### **c. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	40
2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	47
3. Indikator Pemberdayaan.....	53

<b>B. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>61</b>
---------------------------------	-----------

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

1. Sejarah KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera.....65
2. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera.....67
3. Alamat Kantor KSPPS Adil Berkah Sejahtera.....67
4. Produk-Produk KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera.....68

#### **B. Deskripsi Data Penelitian .....73**

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

- a. Mekanisme Pembiayaan Tanggug Renteng.....75
- b. Masalah dan Keuntungan Pembiayaan Tanggug Renteng.....79

#### **B. Pembahasan**

- a. Analisa Akad *Murabahah Al-Wakalah* dalam Pembiayaan Tanggug Renteng.....81
- b. Analisa akad *Kafalah* (jaminan) dalam Penjaminan Sistem Tanggug Renteng.....83

### **BAB V PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.....87**

#### **B. Rekomendasi.....88**

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

### **LAMPIRAN.....**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Pemberdayaan.....55

Tabel 2 angsuran pembiayaan tanggung renteng .....78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar skema <i>Mudarabah al-wakalah</i> .....	82
---	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Berita Acara Munaqosah

Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Prariset

Lampiran 4 : Surat Izin Riset

Lampiran 5 : Panduan Wawancara

Lampiran 6 : Foto Dokumentasi







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT  
ADIL BERKAH SEJAHTERA DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI PEREMPUAN**

Nama

**ADELA PUTRI**

NPM

**1651020488**

Fakultas

**EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jurusan

**PERBANKAN SYARIAH**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Budimansyah, S.Th.I., M. Kom. I**

**NIP.197707252002121001**

  
**Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I**

**NIP.**

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

  
**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**

**NIP.198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

**PEGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT ADIL BERKAH SEJAHTERA LAMPUNG TENGAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN**. Disusun oleh Adelia Putri NPM 1651020488 Jurusan Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada hari Senin, 31 Agustus 2020, pukul 13.00-15.00

WIB.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si

  
(.....)

**Sekretaris** : Dimas Pratomo, M. E

  
(.....)

**Penguji I** : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

  
(.....)

**Penguji II** : Budimansyah, M. Kom. I

  
(.....)

**DEKAN**



Dr. Ruslan Abdul Ghafur, S.Ag., M.Si

NIP. 198008012003121001



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul skripsi, yaitu *“Analisis Penyaluran Pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera Lampung Tengah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”*.

##### 1. Analisis

Usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

##### 2. Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.<sup>1</sup>

Penyaluran Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dan yang membutuhkan dana, dimana pihak penerima dana atau pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

---

<sup>1</sup> Muhamad Turmudi, “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari”, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hal:23

### 3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sama dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan tetapi tata pelaksanaannya berdasarkan prinsip syari'ah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sebagai usahanya.

### 4. BMT

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan aturan dan amanatnya.<sup>2</sup>

### 5. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sekaligus digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

---

<sup>2</sup>Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah", *jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No.2, juli-desember 2017, hal : 180

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.<sup>3</sup> Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperbesar akses dan kontrol perempuan atas sumber daya ekonomi, politik (pengambilan keputusan) dan budaya.

Pemberdayaan ekonomi perempuan berarti upaya untuk memperbesar akses maupun kontrol perempuan dalam sumber daya ekonomi yang ada.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, skripsi yang berjudul “***Analisis Penyaluran Pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera Lampung Tengah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan***” untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan sistem dari penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan, serta bagaimana faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat penyaluran pembiayaan KSPPS Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan di Lampung Tengah.

---

<sup>3</sup>Siti Hasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), Vol. 9, No. 1, oktober 2013, hal:76

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Secara Objektif**

BMT merupakan alternatif pengentasan kemiskinan dan perempuan adalah kelompok miskin. Segmen BMT adalah pedagang dan pengusaha level mikro. Pada kenyataannya, satu per tiga dari usaha mikro di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Akses terhadap sumber keuangan formal merupakan salah satu isu bagi mereka. BPS RI menyebutkan bahwa 15,74% dari rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan dan mayoritas adalah keluarga miskin yang menggantungkan hidupnya dari usaha informal (mikro).

Kelompok perempuan sulit mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya termasuk layanan keuangan. Sistem kredit yang mensyaratkan pembiayaan harus menyertakan agunan sulit dipenuhi perempuan, karena penguasaan atas berbagai sumber daya seperti tanah, rumah, dan aset lain secara kultural berada di bawah kontrol dan penguasaan laki-laki. Untuk itu KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera memiliki program pembiayaan tanpa jaminan untuk kaum perempuan, pembiayaan ini dikhususkan untuk kelompok usaha mikro yang dijalankan oleh perempuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan, masalah dan manfaat penyaluran

pembiayaan KSPPS Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan, serta kesesuaian praktik penyaluran pembiayaan tanggung renteng dalam islam.

2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis yakni Perbankan Syariah. Dimana bahasan tersebut merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan KSPPS.
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber data dan literatur yang dibutuhkan seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan seperti objek penelitian yakni KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, kec. Seputih Surabaya, Lampung Tengah.
- c. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang Penyaluran Pembiayaan KSPPS BMT Adil Sejahtera dalam Pemberdayaan Ekonomi perempuan khususnya di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Diharapkan dapat dijadikan referensi dalam persoalan-persoalan terkait.

### C. Latar Belakang Masalah

Salah satu perwujudan dalam pengentasan kemiskinan yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan dilakukannya sebuah pemberdayaan dalam suatu tatanan masyarakat. Pemberdayaan perempuan dianggap hal yang penting di lakukan, karena perempuan dianggap sebagai wakil kepala keluarga yang di tuntut untuk mencari dan memenuhi pendapatan ekonomi keluarga selain suami terutama bagi keluarga miskin, peran ganda yang harus di emban oleh perempuan menjadikannya semakin kompleks dalam menanggung tugasnya. Namun perempuan memiliki ide kreatif untuk menghasilkan sejumlah uang tambahan untuk membantu suaminya oleh karenanya potensi kaum perempuan miskin bisa menjadi fokus lembaga keuangan mikro syariah terutama BMT yang dapat membantu usaha perempuan meningkat. Oleh sebab itu, perempuan perlu diberdayakan terutama dalam bidang ekonomi untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya untuk meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, seperti bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam, membuat koperasi, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Riset yang secara spesifik mengkaitkan BMT dengan pemberdayaan perempuan sangat jarang dilakukan, mengingat konsep pemberdayaan dalam BMT adalah pada pemberdayaan keluarga, bukan “women only approach” sebagaimana dalam institusi keuangan mikro konvensional.

---

<sup>4</sup>Siti Khasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan”, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013, hal:73

Namun, dalam konteks Indonesia, isu ini penting untuk diangkat paling tidak karena beberapa alasan; pertama BMT merupakan alternatif pengentasan kemiskinan dan perempuan adalah entitas paling miskin di antara kelompok miskin. Kedua, segmen BMT adalah pedagang dan pengusaha level mikro. Pada kenyataannya, satu per tiga dari usaha mikro di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Akses terhadap sumber keuangan formal merupakan salah satu isu bagi mereka. Ketiga, terdapat fenomena peningkatan jumlah perempuan kepala keluarga. BPS RI menyebutkan bahwa 15,74% dari rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan dan mayoritas adalah keluarga miskin yang menggantungkan hidupnya dari usaha informal (mikro).<sup>5</sup>

Kelompok ini sulit mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya termasuk layanan keuangan. Kredit perbankan merupakan salah satu mata rantai yang terputus dalam kehidupan perempuan. Entitas ini dianggap sebagai segmen yang tidak layak untuk didanai karena umumnya pinjaman yang diajukan terlalu kecil, tidak bankable. Akses perbankan menjadi kian jauh dari perempuan karena berbagai aturan yang netral gender. Sistem kredit yang mensyaratkan pembiayaan harus menyertakan agunan sulit dipenuhi perempuan, karena penguasaan atas berbagai sumber daya seperti tanah, rumah, dan aset lain secara kultural berada di bawah kontrol dan penguasaan laki-laki.

---

<sup>5</sup>Ninik Sri Rahayu, "Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Bmt Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)", Volume 4 No. 3, September 2015, hal:163-164

Oleh karenanya, pemberdayaan perempuan menjadi penting karena dapat menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi, diantaranya strategi modernisasi yang mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya yang bersumber dari peran serta masyarakat. Prioritas utama dalam pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian. Artinya perempuan sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rad ayat 11:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak adapelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Rad[13]:11)*

Berdasarkan ayat tersebut kita tahu bahwa Allah SWT tidak akan mengubah keadaan dan martabat satu kaum, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi



dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka. Ayat ini juga mendorong kemandirian dalam jiwa masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan komunitas atau masyarakat penerima pemberdayaan mampu mengubah nasib mereka dan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup termasuk perempuan.

KSPPS BMT Adil Sejahtera memiliki program binaan untuk pemberdayaan kaum perempuan di Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Dimana pada program pembiayaan ini dikhususkan untuk para perempuan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme dan penerapan sistem dari penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan, serta bagaimana faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat penyaluran pembiayaan KSPPS Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan.

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera kepada kelompok usaha mikro yang dijalankan oleh para perempuan, sistem yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah sistem jaminan tanggung renteng. Dimana dalam pembiayaan ini, tidak menggunakan jaminan kebendaan, namun anggota kelompok yang menanggung ketika salah seorang anggota kelompok tidak melaksanakan kewajibannya.

Kelompok yang akan dibiayai memiliki anggota minimal lima orang dan menjalankan usaha mikro seperti usaha pembuatan keripik

singkong, pedagang kecil seperti warung kelontong dan lain sebagainya. Untuk saat ini, KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera telah menyalurkan pembiayaan, diantaranya :di Desa Gaya Baru Tiga, Desa Gaya Baru Lima, Desa Subang Jaya , Desa Raja Wali dan Desa Spontan. Dalam menjalankan pembiayaan ini KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera bekerja sama dengan Kepala Desa Setempat serta para Ibu-Ibu PKK.

Implementasi kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program pinjaman kelompok tanggung renteng dapat menciptakan atau meningkatkan keberdayaan kaum perempuan rumah tangga dalam membangun ekonomi keluarga. Program tersebut telah memungkinkan kaum perempuan rumah tangga dapat melakukan kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan guna menambah pendapatan keluarga. Tujuan khusus dari program pemberdayaan ekonomi perempuan adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha, memberikan kesempatan perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan kelompok tanggung renteng, dan mendorong penguatan kelembagaan pinjaman oleh kaum perempuan. Kegiatan program pemberdayaan perempuan ini dapat dikelola dengan menerapkan nilai-nilai yang lebih berkeadilan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik memilih judul “*Analisis Penyaluran Pembiayaan pada KSPPS BMT Adil*

*Berkah Sejahtera Lampung Tengah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”.*

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?
2. Masalah dan manfaat apa yang didapatkan dari penyaluran pembiayaan KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?
3. Bagaimana kesesuaian praktik penyaluran pembiayaan tanggung renteng dalam islam ?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan pada KSPPS Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan.
- b. Untuk mengetahui Masalah dan manfaatapa yang didapatkan dari penyaluran pembiayaan KSPPS Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

- c. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian praktik penyaluran pembiayaan tanggung renteng dalam islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagi akademisi dan masyarakat, sabagai tambahan informasi dan wawasan dalam memahami bagaimana penyaluran pembiayaan KSPPS Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan, serta Bagaimana faktor yang menjadi pendorong dan penghambat penyaluran pembiayaan KSPPS Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan.
- b. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran secara langsung dalam menambah wawasan keilmuan dan sebagai pelaksanaan tugas akademik sebagai salah satu syarat dalam penuntasan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

## F. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dijadikan masukan atau gagasan bagi pengembangan kajian teoritis penyaluran produk pembiayaan dalam pemberdayaan perempuan.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan yang terkait dengan aspek-aspek lembaga keuangan islam sebagai salah satu konsentrasi dijurusan Perbankan Syariah.

## 2. kegunaan praktis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berharga bagi pengembangan dan kemajuan KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemasaran produk pembiayaan khususnya dalam pemberdayaan perempuan.
- b. KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dapat menjadi contoh inovasi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah secara umum.

## G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>6</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan cara menggunakan suatu kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian penulis.

---

<sup>6</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal:2

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, Lampung Tengah, yang difokuskan pada Analisis Penyaluran Pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer diambil langsung dari karyawan KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, melalui kegiatan wawancara langsung dari karyawan dan staff KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, serta nasabah pembiayaan kelompok perempuan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, seperti dari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan semua individu atau unit-unit yang menjadi target suatu penelitian.<sup>7</sup> Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh staf dan karyawan KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera yaitu sebanyak 7 orang serta seluruh nasabah pembiayaan kelompok perempuan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Biasanya dilakukan atas pertimbangan tertentu.<sup>8</sup> Sampel pada penelitian ini yaitu *Branch Manager* KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, *Customer Servis* KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, *Accounting* KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera serta nasabah pembiayaan kelompok tanggung renteng.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, Gaya Baru III, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal : 216

<sup>8</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Rajawali Pers:2017), hal :68

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*), data yang diambil berupa:

### a. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi *nonpartisipan*. *Observasi nonpartisipan* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>9</sup> Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang analisis penyaluran pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya di desa Gaya Baru III, Kec. Seputih Surabaya, Lampung Tengah.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>10</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh keterangan dengan tanya jawab sambil bertatap muka menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*wawancara Guide*).

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

---

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*...., hal :145

<sup>10</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*...., hal:83



karya momental dari seseorang.<sup>11</sup>Segala aktifitas yang berkaitan dengan pengumpulan, pendataan, pengelolaan dokumen-dokumen, secara sistematis dan ilmiah serta pendistribusian informasi kepada informan.

#### 6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi penulis himpun kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* (pemeriksaan data), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk tidak logis dan meragukan.
- b. Klarifikasi (pengelompokan data), yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenisnya.
- c. Interpretasi (penafsiran), yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil data yang telah dihimpun sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

#### 7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu semua data yang telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal: 84

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi dan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
- b. *Data Display* (penyajian data), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan langkah ini, akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya.
- c. *Cunclucion drawing/verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### A. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)

##### 1. Pengertian KSPPS

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan pengistilahan yang dipakai dalam istilah umum, namun lembaga keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT atau KSPPS.

Secara umum, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang melayani keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

Dalam pembahasan yang lebih mendalam Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang memberikan pengertian bahwa lembaga keuangan adalah “Badan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat”.

Hal senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan baik Konvensional maupun

---

<sup>12</sup>Arif Rahman Eka Permata, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik” (Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura)

Syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali kemasyarakat”.<sup>13</sup>

(KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tarlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, sodaqah, wakaf). Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

## 2. Dasar Hukum KSPPS

Regulasi BMT bila di lihat dari badan hukumnya di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :<sup>14</sup>

- 1) BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS) dan tunduk pada Undang-

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Novita Dwi Marsyito, “Analisis Normatif UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT”, *Jurnal Ecoomica*, Vol.V, juli 2014, hal: 29

undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya kegiatan usahanya tunduk pada :

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
  - b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
  - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- 2) BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 3) BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT dapat dikatakan

sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro bila memiliki status badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas. Bila berbentuk koperasi maka tunduk pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum Perseroan Terbatas maka pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan bila BMT Berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 2013 sahamnya paling sedikit 60 % dimiliki pemerintah daerah kabupaten/ kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.<sup>15</sup>

Terbitnya keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUMKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan UMKM.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Novita Dwi Masyito, "Analisis Normatif UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan BMT", *Jurnal Economica*, Vol. V (Juli 2014), h. 29

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*...., hal:469

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUMKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain keberadaan KJKS yang secara penuh beroperasi secara syariah, koperasi konvensional juga dapat membuka Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).<sup>17</sup>

Unit Jasa Keuangan Syariah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (3) Kepmen Kop No. 91/Kep/M.KUMKM/IX/2004 adalah unit Koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Dengan demikian, sebuah koperasi yang mempunyai UJKS disamping melayani anggota dengan ketentuan UU No.25 Tahun 1992, juga melaksanakan kegiatan yang diatur dalam keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUMKM/IX/2004.<sup>18</sup>

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari Lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal:470

<sup>18</sup> *Ibid*

menjadi Lembaga Keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum KJKS dibawah pembinaan Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih bervadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dibawah UU No. 1 tahun 20013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal didalam sistem keuangan nasional.<sup>19</sup>

BMT yang telah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 januari 2015, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 januari 2016. Bentuk badan hukum BMT umumnya berbentuk Koperasi dimana AD/ART disahkan oleh menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada kantor OJK/kantor regional/direktorat lembaga keuangan mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.<sup>20</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal: 478

<sup>20</sup> *Ibid*, hal: 479



- a. Tujuan KSPPS, yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>21</sup>
- b. Fungsi KSPPS, yaitu:
  - 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalah (Pokusma) dan kerjanya.
  - 2) Mempertinggi kualitas SDM angota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
  - 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>22</sup>

#### **4. Produk-Produk BMT/KSPPS**

##### **a. Produk Pengumpulan Dana**

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad Wadiah dan Mudharabah.

- a) Simpanan Wadiah, Simpanan/tabungan yang berakad wadiah ada dua, yaitu wadiah yad-amanah dan wadiah yad-dhamanah. Wadiah Yad-Amanah yaitu akad yang menyatakan bahwa penerima

---

<sup>21</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke 2 Jakarta:Kencana,2016,hal:474

<sup>22</sup> Jenita, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*, jurnal *Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No.2, juli-desember 2017, hal: 182

titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Tetapi harus tetap menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai penitipan. Wadi'ah Amanah yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat, infak dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif. Wadi'ah Yad-Dhamanah dapat diartikan sebagai titipan murni dimana dana yang dititipkan boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan dana tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>23</sup>

- b) Simpanan Mudharabah, adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shahibul mal , sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) tertentu, disebut mudharib. Dalam kerangka penghimpunan dana mudharabah, nasabah

---

<sup>23</sup> Nur Hamidah, "Penerapan Prinsip Wadi'ah, Mudharabah, Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Pada Bmt Al-Hikmah Ungaran Timur", Universitas Islam Sultan Agung Semarang , *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017, hal:127

bertindak sebagai *shahibulmal* dan BMT sebagai *mudharib*.<sup>24</sup>

Variasi jenis simpan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti:

- (1) Simpanan Idul Fitri
- (2) Simpanan Idul Qurban
- (3) Simpanan Haji
- (4) Simpanan Pendidikan
- (5) Simpanan Kesehatan, dll.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>25</sup>

#### b. Produk Penyaluran Dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke 2 Jakarta:Kencana, 2016, hal :474

<sup>26</sup> Perpus Kampus,” Pengertian, asas, sifat, peran, fungsi dan produk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)” (On-line) tersedia di <https://perpuskampus.com/pengertian-asas-sifat-peran-fungsi-dan-produk-bmt-baitul-maal-wa-tamwil/> access on 15 februari 2020, 21:42

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu:

- a) Akad syirkah
- b) Akad jual beli

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan islami lainnya adalah:

- a) Pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*. Pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pinjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.<sup>27</sup>
- b) Pembiayaan *Murabahah* atau pembiayaan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang

---

<sup>27</sup> *Ibid*

yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.<sup>28</sup>

- c) Pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shohibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>29</sup> Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.
- d) Pembiayaan *Musarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>30</sup> Pembiayaan dengan akad syirkah adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

---

<sup>28</sup> Nur Hamidah, "Penerapan Prinsip Wadi'ah, Mudharabah, Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Pada Bmt Al-Hikmah Ungaran Timur", Universitas Islam Sultan Agung Semarang , *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017, hal:126

<sup>29</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Yogyakarta:Salemba Empat,2014, hal : 110

<sup>30</sup> *Ibid*, hal :136

- e) Pembiayaan *al-Qordhul Hasan*. Pembiayaan dengan akad ibadah. Pembiayaan Qordhul Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampunya untuk melunasi kewajiban usahanya.<sup>31</sup>

## 5. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan lembaga perbankan untuk mendukung investasi, konsumsi dan produksi yang ditujukan kepada nasabah. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (UU No. 10,1998, bab I, pasal I)

---

<sup>31</sup> Perpus Kampus,” Pengertian, asas, sifat, peran, fungsi dan produk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)” (On-line) tersedia di <https://perpuskampus.com/pengertian-asas-sifat-peran-fungsi-dan-produk-bmt-baitul-maal-wa-tamwil/> access on 15 februari 2020, 21:42



Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.<sup>32</sup>

Konsep pembiayaan pada bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>33</sup>

## 6. Unsur-unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan, jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank ataupun lembaga keuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

---

<sup>32</sup> Muhamad Turmudi, *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017 hal: 23

<sup>33</sup> *Ibid*

- c. Jangka Waktu, setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
- d. Resiko, dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat resiko kerugian. Seperti terjadinya *side streaming*, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah.
- e. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.<sup>34</sup>

## 7. Jenis-jenis Pembiayaan

### 1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pada dasarnya, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan periode waktu pendek atau panjang untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang

---

<sup>34</sup> *Ibid* , hal: 24

dinilai memiliki prospek, juga tidak melanggar syariat islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

a) Pembiayaan syariah dengan Skema Jual Beli (*Murabahah*)

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).<sup>35</sup> Perlu diketahui bahwa untuk tingkat keuntungan bank sudah ditentukan diawal, dan keuntungan ini menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

b) Pembiayaan syariah dengan Skema Kerja Sama

Jenis kontrak pembiayaan syariah yang selanjutnya adalah dengan skema kemitraan bagi hasil atau *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan syariah pada skema ini didasarkan pada kemauan kedua belah pihak untuk melakukan kerja

---

<sup>35</sup> Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Yogyakarta:Salemba Empat,2014) hal:160

sama. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>36</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Seperti halnya transaksi *mudharabah*, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi *mudharabah*.<sup>37</sup>

## 2. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan nasabah dengan tujuan diluar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan skunder.

---

<sup>36</sup> *Ibid* , hal: 110

<sup>37</sup> *Ibid*, hal:136

Jenis akad yang paling sering digunakan dalam produk pembiayaan konsumtif syariah ada dua, yaitu akad murabahah dan akad ijarah.<sup>38</sup>

a) Pembiayaan Syariah untuk kebutuhan konsumtif skema *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah salah satu akad utama dalam pembiayaan syariah. Hal itu karena sistem serta cara kalkulasi perhitungan dengan skema akad ini lebih mudah.

b) Pembiayaan Syariah untuk kebutuhan konsumtif skema *Ijarah*

Pada dasarnya, prinsip dalam akad *ijarah* hampir serupa dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksi. Dalam transaksi jual beli obyek transaksinya adalah jenis barang, maka dalam akad ijarah, pembiayaan diberikan untuk suatu jasa.

### 3. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek/usaha baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin

---

<sup>38</sup> Perpus Kampus,” Pengertian, asas, sifat, peran, fungsi dan produk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)” (On-line) tersedia di <https://perpuskampus.com/pengertian-asas-sifat-peran-fungsi-dan-produk-bmt-baitul-maal-wa-tamwil/> access on 15 februari 2020, 21:42.

pabrik. Akad yang biasanya diterapkan dalam jenis pembiayaan investasi syariah adalah akad *murabahah* dan *ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT).

## 8. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk tingkat Makro dan pembiayaan tingkat Mikro.<sup>39</sup> Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha butuh dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produktifitasnya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha

---

<sup>39</sup> Muhamad Turmudi, Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.hal:24



tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Selain pembiayaan makro, terdapat pembiayaan mikro yang diperuntukkan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan berikut:<sup>40</sup>

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.
- b. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan. Pada dasarnya dapat meningkatkan sumber daya ekonomi.
- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak lain yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*minus*) dana.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal:25

<sup>41</sup> Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah....", hal:25

## B. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

### 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.<sup>42</sup> Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperbesar akses dan kontrol perempuan atas sumber daya ekonomi, politik (pengambilan keputusan) dan budaya.

Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain dibidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Fenomena diatas menunjukkan perempuan masih menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang sangat luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Keberadaan perempuan dibidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas bekerja diluar rumah serta

---

<sup>42</sup> Siti Hasanah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)", Vol. 9, No. 1, oktober 2013, hal:76

mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat.<sup>43</sup>

Mengkaji perempuan tidak dapat terlepas dari nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Menurut Aritonang Pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan ketrampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain : posisi pengambil keputusan, sumber dan struktur atau jalur yang menunjang.<sup>44</sup>

#### a. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan sebagai tujuan. Maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan

---

<sup>43</sup> Retno Endah Supeni dan Maheni Eka Sari, "Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi deskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Worolegi Kabupaten Jember, Dampingan pusat Studi Wanita UM Jember), *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan* , Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011, hal: 101

<sup>44</sup> *Ibid*, hal : 74

diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya.<sup>45</sup>

b. Hakikat pemberdayaan

Hakikat pemberdayaan memiliki beberapa makna, yaitu ada pihak yang memberikan kekuasaan (*power*) kepada yang lemah, pihak yang diberikan kekuasaan atau diberdayakan, serta adanya upaya untuk mengubah perilaku yang diberdayakan kearah yang lebih baik yaitu kemandirian.

Menurut Chamber, individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang sering kali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar. Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah kalangan petugas pembangunan baik formal maupun non formal. Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas dilapangan, seperti : pegawai kelurahan atau desa, penyuluh, guru, dosen, pegawai puskesmas, dokter, bidan, dan profesi lapangan lainnya. Petugas nonformal adalah individu yang memiliki dedikasi secara sukarela untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola oleh suatu lembaga (LSM) atau secara pribadi. Petugas non formal tersebut

---

<sup>45</sup> M. Firdaus dan Titih Hartini, "Aspek Pemberdayaan Perempuan di Balik Lembaga Kredit Mikro", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 6, No. 3, desember 2011, hal: 43

diantaranya relawan, pekerja sosial, kader PKK, kader Posdaya, mahasiswa, ulama simpatisan, dan lainnya.<sup>46</sup>

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku menuju kearah kemandirian. Perubahan perilaku ini, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, petugas yang memberdayakan individu dan masyarakat baik formal maupun nonformal dapat disebut sebagai agen pemberdayaan (*agen of empowerment*).<sup>47</sup>

#### c. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan ditujukan agar *client* atau sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupan untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak

---

<sup>46</sup> Oos M. Anwas, Haryono Suyono, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal : 55

<sup>47</sup> Oos M. Anwas, Haryono Suyono, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal : 55

yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat dan potensi yang berbeda. Usur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan dari ciri pemberdayaan.

- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi *client* atau sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi pada dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dalam menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup, aspek kebutuhan, masalah, dan potensi tidak nampak. Agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien atau sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktifitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong



royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkan kembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendorong kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*life long learning / education*) individu dan masyarakat perlu dibiasakan

belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa : pesan, orang (termasuk masyarakat disekitarnya), bahan, alat, takhnik, dan juga lingkungan tempat tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktifitas pemberdayaan.
- l. Klien atau sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, mulai dari : mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta

dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.<sup>48</sup>

## 2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Ekonomi umat, yang dalam istilah Indonesia dapat disebut sebagai ekonomi kerakyatan, merupakan sistem ekonomi yang menekankan pada dimensi keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi dan lebih diutamakan proses produksi dan konsumsi. Dalam ekonomi kerakyatan ini, kemakmuran rakyat lebih diutamakan dari pada kemakmuran orang per orang. Dengan demikian sistem ekonomi berbasis kerakyatan berasaskan pada kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan pengelolaan dikembalikan kepada rakyat, dan menunjukkan pemihakkan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal : 60

<sup>49</sup> Khoiruddin, A. Zuliansyah, Ridwansyah, *Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Syariah di Jatimulyo Lampung Selatan*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), hal : 14

Ciri-ciri dari ekonomi kerakyatan yaitu :

- 1) Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik (bila perlu pada daerah kabupaten atau kota) dengan tingkat kemandirian yang tinggi.
- 2) Kepercayaan diri dan kesetaraan.
- 3) Meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan.
- 4) Partisipatif.
- 5) Adanya persaingan yang sehat,
- 6) Keterbukaan atau demokratis, dan
- 7) Pemerataan yang berkeadilan.<sup>50</sup>

Konstituen utama ekonomi kerakyatan adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi neoliberal. Dalam garis besarnya mereka terdiri dari kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kelompok pengusaha kecil, kaum miskin kota, dan kaum *mustad'afin* pada umumnya yang merupakan aktor ekonomi dengan kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalan, sarana teknologi produksi yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi.<sup>51</sup>

Musuh utama ekonomi kerakyatan terdiri dari para pengusaha negara yang membela kepentingan para pemodal besar, para pemodal besar domestik, perusahaan-perusahaan trans nasional, pemerintah negara-negara industri pemberi hutang,

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal: 15

<sup>51</sup> *Ibid*

dan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral yang menjadi kepanjangan tangan para pemodal internasional.<sup>52</sup>

Substansi dari ekonomi kerakyatan mencakup tiga hal sebagai berikut :

- a. Adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional sangat penting artinya bagi ekonomi kerakyatan. Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu.
- b. Adanya partisipasi penuh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar.
- c. Pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, kedaulatan ekonomi harus berada ditangan rakyat. Bukan ditangan para pemilik modal sebagai mana dalam sistem ekonomi pasar neoliberal. Walaupun misalnya kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan oleh para

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal:16

pemodal asing, kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada dibawah pengawasan dan pengendalian masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan, yakni :

- a. Akses, dalam arti kesaamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif didalam lingkungan.
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
- d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.<sup>53</sup>

### **3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Pemberdayaan merupakan kekuatan yang berasal dari dalam yang diperkuat oleh unsur-unsur dari luar, termasuk didalamnya adalah membangun daya, mendorong, memberikan motivasi,

---

<sup>53</sup> Ninik Sri Rahayu, "Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah...., hal:166



dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya.<sup>54</sup>

Adapun tujuan khusus pemberdayaan ekonomi adalah:

- a. Membangun negara yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- c. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.
- d. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Sedangkan tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan :

- a. Produktifitas menuju kemandirian, Peran serta perempuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, apabila kita telaah secara lebih seksama merupakan pemberdayaan masyarakat yang maknanya dapat disamakan dengan perolehan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Perempuan telah memberikan suatu andil terhadap masyarakatnya. Disamping menjadi ibu rumah tangga, mereka juga mencoba peduli terhadap komunitas dimana mereka tinggal dan berdomisili.
- b. Potensi untuk maju, Berangkat dari sisi ini, tidaklah berlebihan bila dorongan (*Support*) para perempuan untuk berani mengungkapkan jati dirinya dan berusaha semaksimal

---

<sup>54</sup> Alamul huda, "Peran Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, juni 2013, hal:44

mungkin memompa potensinya serta menyatakan eksistensi identitasnya, yaitu untuk kesejahteraan keluarga dan menolong sistem masyarakat lewat sistem perekonomian yang saling menguntungkan.

- c. Peningkatan taraf hidup, Konteks pemberdayaan selalu mengacu pada kelompok masyarakat yang lemah, yaitu masyarakat yang berada pada kasta rendah akibat menjadi korban dinamika pembangunan. Peran perempuan menjadi penting kehadirannya dalam pemberdayaan ini, karena pada hakekatnya, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari jeratan perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>55</sup>

Pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat menciptakan kondisi, suasana, iklim, yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi, diantaranya strategi modernisasi yang mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya yang bersumber dari peran serta masyarakat. Oleh sebab itu, perempuan perlu diberdayakan terutama dalam bidang ekonomi untuk

---

<sup>55</sup> Khoiruddin, A. Zuliansyah, Ridwansyah, *Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Syariah di Jatimulyo Lampung Selatan*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014). hal :17

mengatasi kemiskinan kaum perempuan dan keluarganya untuk meningkatkan penghasilan perempuan dalam bidang ekonomi, seperti bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam, dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian yang terkait untuk dijadikan sebagai referensi. Pokok permasalahan ini yaitu melihat kedudukan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah agar fokus penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya melainkan melihat sisi lain dari penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan Muhamad Turmudi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, yang berjudul “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari”.<sup>57</sup> Adapun fokus persamaan dengan penelitian ini yaitu pembiayaan syariah dengan metode kualitatif, namun perbedaan pada penelitian ini dari penelitian diatas yaitu penelitian ini membahas tentang peran pembiayaan yang disalurkan KSPPS BMT Adil Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan.

---

<sup>56</sup> Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*, Vol. 9, No. 1, oktober 2013, hal : 73

<sup>57</sup> Muhamad Turmudi, *“Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah....*, hal:20

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Sri Rahayu (Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia) yang berjudul “Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta).<sup>58</sup> Adapun fokus persamaan penelitian ini yaitu kontribusi lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan perempuan, yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini membahas tentang peran pembiayaan yang disalurkan KSPPS BMT Adil Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan,.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Maika dan Eddy Kiswanto yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Miskin pada Usaha Kecil di pedesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro”.<sup>59</sup> Adapun fokus persamaan pada penelitian ini yaitu pemberian pembiayaan atau kredit mikro untuk para perempuan dan penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang dilakukan di Yayasan usaha mandiri. Pembeda dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dan melihat perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan BMT. Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu analisis pemberian pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi perempuan serta faktor-faktor

---

<sup>58</sup> Ninik Sri Rahayu, “Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan ...hal:162

<sup>59</sup> Amelia Maika dan Eddy Kiswanto, “Pemberdayaan Perempuan Miskin pada Usaha Kecil di Pedesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro”, *Populasi*, 18(1), 2007, ISSN: 0853-0262

penghambat dan pendorong pemberian pembiayaan pada KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Cahyani Puspita Sari Dalam jurnal Pemikiran Sosiologi yang berjudul “Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga”.<sup>60</sup> Fokus persamaan dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan, yang menjadi pembeda dalam penelitian yang penulis teliti yaitu penyaluran pembiayaan oleh KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera.
5. Penelitian yang dilakukan Siti Rohmah yang berjudul “Pengaruh Peyaluran Pembiayaan BMT Al-Jiba Al dan BMT Mekar Dakwah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”.<sup>61</sup> Adapun fokus persamaan penelitian ini yaitu pembiayaan BMT dalam pemberdayaan Ekonomi Perempuan, yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini membahas BMT mana yang paling berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dan pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif.
6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Qoshid Al Hadi yang berjudul “Efektivitas Program Membangun Keluarga Utama sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Islami (Studi Kasus di KSPPS

---

<sup>60</sup> Dewi Cahyani Puspitasari, “*Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga*”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.1, No.2 , november 2012

<sup>61</sup> Siti Rohmah, “*Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jiba Al dan BMT Mekar Dakwah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

BMT Tumang)".<sup>62</sup> Fokus persamaan penelitian ini adalah penelitian yang membahas suatu ranah pemberdayaan pada KSPPS, dan menggunakan metode kuantitatif. Adapun yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang penulis teliti yaitu tentang penyaluran pembiayaan KSPPS dalam pemberdayaan perempuan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Kusumawati yang berjudul "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (Kspps) Bmt Nu Sejahtera Mijen Semarang".<sup>63</sup> Fokus persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah studi kasus yang diteliti sama sama menggunakan KSPPS BMT, dimana penelitian tersebut memilih (Kspps) Bmt Nu Sejahtera Mijen Semarang sebagai objek penelitiannya sedangkan penelitian yang penulis teliti memilih objek KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam penelitiannya, selain itu penelitian tersebut membahas Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (Kspps), sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah tentang analisis penyaluran pembiayaan yang di salurkan oleh KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera dalam pemberdayaan perempuan.

---

<sup>62</sup> M. Qoshid Al Hadi yang berjudul "Efektivitas Program Membangun Keluarga Utama sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Islami (Studi Kasus di KSPPS BMT Tumang)", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 15, No. 01, Juni 2019, hal :11

<sup>63</sup> Dyah Kusumawati, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (Kspps) Bmt Nu Sejahtera Mijen Semarang", Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 2018 ,hal :51

## DAFTAR PUSTAKA

Alamul huda, Peran Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, juni 2013.

Al-Qur'an Surah An-nisa [4] : 32.

Amelia Maika dan Eddy Kiswanto, Pemberdayaan Perempuan Miskin pada Usaha Kecil di Perdesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro, *Populasi*, 18(1), 2007, ISSN: 0853-0262.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke 2 Jakarta: Kencana, 2016.

Arif Rahman Eka Permata, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik (Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura).

Dyah Kusumawati, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (Kspps) Bmt Nu Sejahtera Mijen Semarang, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/VI/2000 , Tentang *Kafalah*.

Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi akbar, Nuri Nur azizah, Giri Putri Juliani, Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* , Vol: 3 juli 2019.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rajawali Pers, 2017.

Jenita, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*, *jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No.2, juli-desember 2017.



Khoiruddin,A. Zuliansyah, Ridwansyah, *Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Syariah di Jatimulyo Lampung Selatan*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2014).

Mandiri Syariah, “Istilah Perbankan Syariah” (On-line) tersedia di [mandirisyariah.co.id](http://mandirisyariah.co.id) access on 19 juni 2020, 17:11.

Muhamad Turmudi, Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.

Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin Grameen Bank*, (Batu Merah, 2007).

M. Firdaus dan Titih Hartini, Aspek Pemberdayaan Perempuan di Balik Lembaga Kredit Mikro,*Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 6, No. 3, desember 2011.

M. Qoshid Al Hadi yang berjudul Efektivitas Program Membangun Keluarga Utama sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Islami (Studi Kasus di KSPPS BMT Tumang), *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 01, Juni 2019.

Ninik Sri Rahayu, Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta), *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol.3, No. 3, September 2015.

Nur Hamidah, “Penerapan Prinsip Wadi’ah, Mudharabah, Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Pada Bmt Al-Hikmah Ungaran Timur”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang , *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017

Novita Dwi Masyito, Analisis Normatif UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan BMT, *Jurnal Economica*, Vol. V (Juli 2014).

Oos M. Anwas, Haryono Suyono, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Perpus Kampus,” Pengertian, asas, sifat, peran, fungsi dan produk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)” (On-line) tersedia di <https://perpuskampus.com/pengertian-asas-sifat-peran-fungsi-dan-produk-bmt-baitul-maal-wa-tamwil/> access on 15 february 2020, 21:42.

Retno Endah Supeni dan Maheni Eka Sari, Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi diskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Worolegi Kabupaten Jember, Dampingan pusat Studi Wanita UM Jember), *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*, Fakultas Ekonomi UNIMUS.

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Yogyakarta:Salemba Empat,2014.

Siti Hasanah, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), Vol. 9, No. 1, oktober 2013.

Siti Rohmah, *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jiba Al dan BMT Mekar Dakwah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2014.

Syaiful Arifin, Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3 September 2008.

Utari, “Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah dan Manfaatnya”, (On-line) tersedia di <https://www.seputarforex.com/amp/artikel/jenisjenis-pembiayaan-syariah-dan-manfaatnya-277348-37>, accessed on february 10, 2020, 12:45.

Wawancara dengan Cecep Indrawan, SE, Sy, *Branch Manager* KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, tgl 10 maret 2020, pukul 15.00 .

Wawancara dengan Desi Irawati, *Accounting* KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, tgl 15 April 2020, pukul 10.00 .

Wawancara dengan Lis Lilik Safitri, *Customer Servis* KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera, tgl 08 maret 2020, pukul 09.00.

Wawancara dengan Rahayu, Anggota pembiayaan tanggung renteng Desa Gaya Baru Lima, tanggal 14 juli, pukul 15.00.

Wawancara dengan Nur aini, Anggota pembiayaan tanggung renteng Desa Gaya Baru Tiga, tanggal 14 juli, pukul 15.00.

Yogi Herlambang, Shafia Azyani, Yola Else Ifghania Farras, dan M. Faisal Amin, Konsep Keadilan bagi Nasabah dalam Akad *Murabahab bil Wakalah* di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2, juli 2019.

